

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Achmad Syahrul Ramadhani. 2022. *Kecamatan Binamu Dalam Angka 2022 (Satu Data Kabupaten Jeneponto Menuju Satu Data Indonesia)*. BPS Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. (Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah). PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Arif Satria. 2019. *Politik SDA*. Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Dedi Supriadi. 2021. *Model Ekonometrika Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil*. CV. Penerbit Lakeisha. Klaten.
- Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Penerbit Lakeisha. Klaten.
- Enny Nurbaningsih. 2019. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Makassar.
- Heryandi. dkk. *Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan & Perikanan di Era Otonomi Daerah*. CV. Anugrah Utama Jaya. Bandar Lampung
- Indri Pratiwi Siregar. 2021. *Kajian Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. Lombok
- Mahfudlah Fajrie. 2016. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah*. CV. Mangku Bumi Media. Jawa Tengah.
- Maskawati. 2019. *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Lingkungan Hidup*. Litera. Yogyakarta.
- Zed. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.



- Muhammad Imron, Rois S Q Haq, dan Mulyono S Baskoro. 2020. *Perikanan Gillnet Skala Kecil Penggerak Ekonomi Nelayan*. PT. Penerbit IPB Press. Bogor.
- Muh. Irsyad Ramadhany, 2015, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Trust Media Publishing. D.I Yogyakarta.
- Muhammad Syahri Ramadhan. 2021. *Sosiologi Hukum*. CV. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Neil Hawke dan Neil Parpworth. 2021. *Pemerintah Daerah: Seri Pengantar Hukum Administrasi*, NUSAMEDIA. Jakarta.
- Rina Yulianti. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Septi Rindawati. 2021. *Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan*. Media Sains Indonesia. Bandung
- Sirajuddin. 2015. *Perda Berbasis Norma Agama*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Syaukani. dkk. 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tim Visi Yustisia. 2014. *UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya, Peraturan Perundang-Undangan, dan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*. PT. Visi Media Asia. Jakarta.
- Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Sulawesi Selatan.

SKRIPSI/TESIS

- M. Ghiffari Andrista. 2022. *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Nur Ainun Wulandari. 2022. *Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan*. kripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.



JURNAL

Bambang Setyadi, "Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5, Nomor 2, Agustus 2007.

Bambang Sektiawan Wibisono dan Sigit Handoko, Retno Saraswati, "Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan", Jurnal Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2020.

Devina Ayu Dayang Ruby, Retno Saraswati, "Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 3, Nomor 3, September 2021.

Endang Retnowati, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)", Jurnal Perspektif, Vol. 16, Nomor 3, Mei 2011.

Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. 6, Nomor 1, Januari-Juni 2022.

Ghana Chlmid Gandyo, Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin, "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Nomor 3, Juni 2016.

I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali, "Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Kota Denpasar", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, Nomor 3, September 2020.

Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah", Jurnal Hukum, Vol. 18, Nomor 3, Juni 2011.

Karjuni Dt, Maani, dkk, "*collaborative Governance* Sebagai Solusi Dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan", Jurnal Sosio Informa, Vol. 7, Nomor 2, Mei-Agustus 2021.

Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, Nomor 19, Februari 2014.

/ani Siregar, "Efektivitas Hukum", Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Arakatan, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2018.



Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Platax, Vol. 1, Nomor 2, Januari 2013.

Salsabilla Dzulqarnain, Fifiana Wisnaeni, Amalia Diamantina, "Pelaksanaan Pemberian Jaminan Risiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil Di Kota Semarang", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 11, Nomor 2, April 2022.

Siti Hajar Suryawati dan Tenny Apriliani, Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil, Jurnal Kebijakan Sosek, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 38.

Supriadi, "Peraturan daerah, antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2016.

Syifaaur Rahmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 25, Nomor 10, Januari 2019.

Zainuddin, Faizal Riza, "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, Nomor 2, Juli-Desember 2021.

ARTIKEL INTERNET

Jeneponto.go.id, "Kabupaten Jeneponto Statistic Sectoral 11 Februari 2020 <https://www.jenepontokab.go.id/statistik_sektoral> [Diakses, 23 November 2022].

Sulselprov.go.id, "Sipakatau Baruga Pelayanan Masyarakat" 3 Maret 2019 <http://sulselprov.go.id/pages/des_kab/7> [Diakses, 15 November 2022].

TribunJeneponto.com, "Nelayan di Jeneponto Bingung, Ada Surat Rekomendasi Tapi Tetap Tak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Nelayan di Jeneponto Bingung, Ada Surat Rekomendasi Tapi Tetap Tak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen", Rabu, 21 Juni 2023, <<https://makassar.tribunnews.com/2022/05/06/nelayan-di-jeneponto-bingung-ada-surat-rekomendasi-tapi-tetap-tak-bisa-beli-pertalite-pakai-jerigen>> [Diakses, 21 Juni 2023].



c.id, "Logo dan File Resmi Unhas", 2022, <<https://www.unhas.ac.id/logo-resmi-unhas/?lang=id>> [Diakses, 31 Juli 2023].

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 5870).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



LAMPIRAN

Foto saat wawancara (Foto-foto Informan)



Gambar 1. Aisyah, (Staf Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan daya saing Perikanan, Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Jeneponto)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2. Pani, (Nelayan Kecil)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 3. Jamal, (Nelayan Kecil)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 4. Ardi, (Nelayan Kecil)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 5. Salli, (Nelayan Kecil)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti





Gambar 5. Sirallo, (Nelayan Kecil)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 6. Arif, (Nelayan Kecil)
Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

